

RENCANA KERJA

Tahun 2025

KECAMATAN KALORAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KALORAN

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA KECAMATAN KALORAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

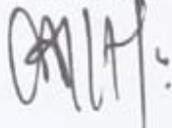
Disusun oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN KALORAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 10 Juli 2024

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator

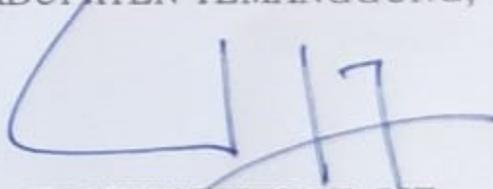


ARIA ISPRADANA, S.Kom

Penata Muda

NIP. 19891212 202202 1 002

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



DWI SUKARMEI, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Kaloran dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kaloran Tahun 2025. Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Kaloran dan Program Indikatif Tahun Anggaran 2025. Adapun tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kaloran Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

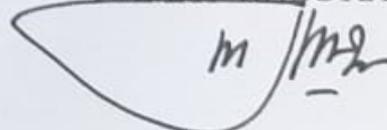
1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kaloran selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2025 ;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Kaloran Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kaloran Tahun 2025;
5. Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kecamatan Kaloran Tahun .

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Kaloran Tahun 2025 bisa menjadi sebuah dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Kaloran.

Kaloran,

2024

CAMAT KALORAN



JULI RIASTIANA T, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19680716 198803 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN KALORAN TAHUN 2023	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kaloran Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Kaloran Tahun 2019-2024	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kaloran Tahun 2019-2024	20
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Kaloran	35
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	36
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	40
2.6. Inovasi Perangkat Daerah.....	40
2.7. Penghargaan	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kaloran	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
4.1. Program Dan Kegiatan	45
BAB V PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kaloran s.d Tahun 2024	11
Tabel. 2.2	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kaloran s.d Triwulan I tahun 2024	15
Tabel 2.3	: Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Kaloran Triwulan I Tahun 2024 Kabupaten Temanggung	21
Tabel 2.4	: Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan.....	25
Tabel 2.5	: Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kaloran Tahun 2019 s.d Tahun 2024 Triwulan I.....	25
Tabel 2.6	: Jumlah Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di kecamatan.....	26
Tabel 2.7	: Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kaloran Tahun 2019 s.d Tahun 2024 Triwulan I	28
Tabel 2.8	: Persentase Realisasi Penerimaan PBB Desa se-Kecamatan Kaloran Tahun 2024 s.d Triwulan I.....	28
Tabel 2.9	: Persentase Desa Menyelesaikan Kegiatan RKPDes Tepat Waktu Kecamatan Kaloran Tahun 2018 s.d Tahun 2024 Triwulan I	29
Tabel 2.10	: Desa Yang Menyelesaikan Kegiatan RKPDes Tepat Waktu Di Kecamatan Kaloran Tahun 2024.....	30
Tabel 2.11	: Persentase Penanganan Laporan Penanganan Kejadian di Kecamatan Kaloran Tahun 2018 s.d. 2024 Triwulan I	31
Tabel 2.12	: Data laporan Kejadian Sampai Tahun 2024 Triwulan I	32
Tabel 2.12	: Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa di Kecamatan Kaloran Tahun 2020 s.d 2024 Triwulan I	33
Tabel 2.14	: Jumlah Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa di Kecamatan Kaloran Tahun 2024 s.d Triwulan I.....	33
Tabel 2.15	: Persentase Desa Yang Menyelesaikan Kegiatan APBDes Tepat Waktu Di Kecamatan Kaloran 2020 s.d 2024 Triwulan I.....	34
Tabel 2.16	: Persentase Desa Menyelesaikan Kegiatan APBDes Tepat Waktu Di Kecamatan Kaloran Tahun 2024 s.d Triwulan I	35
Tabel 2.17	: <i>Review</i> terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025	40

Tabel 2.18	:	Usulan usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat....	40
Tabel 2.19	:	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2021-2023.....	40
Tabel 2.24	:	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung 2021-2023.....	40
Tabel 3.1	:	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Kecamatan Kaloran 2025	42
Tabel 4.1	:	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kaloran Kab. Temanggung Tahun 2025....	46
Tabel 4.2	:	Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kaloran Kab. Temanggung Tahun 2025.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

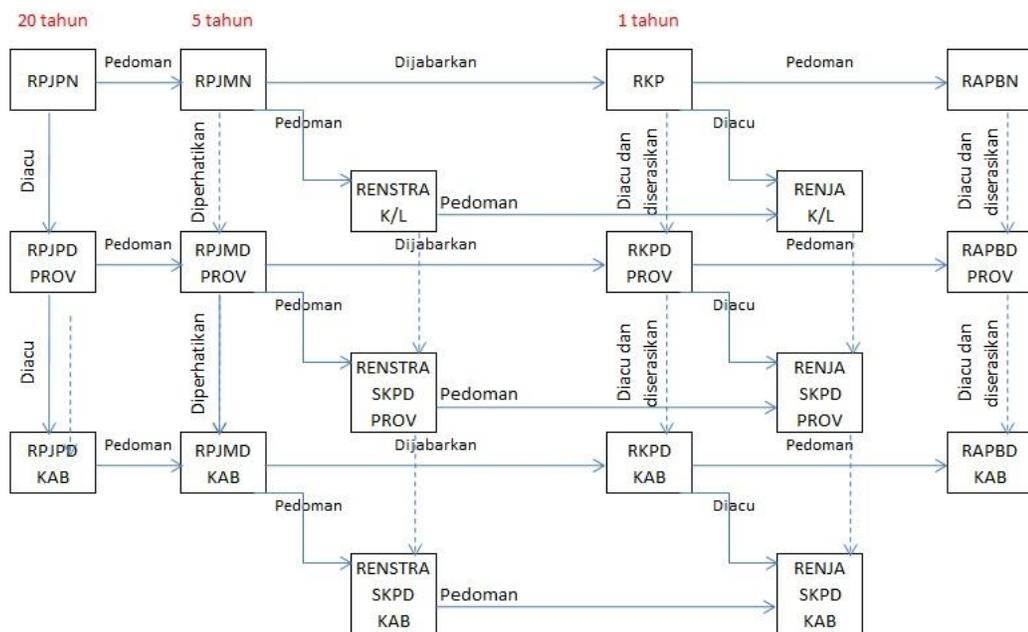
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Kaloran, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Kaloran, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kaloran;
- 2) Kondisi pelayanan Kecamatan Kaloran;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kaloran;
- 4) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Kaloran;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Kaloran;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Kaloran.

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Kaloran;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Kaloran adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Kaloran.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian

IKPD;

- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Kaloran untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, dan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Kaloran.

c. *Mereview* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kaloran tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Kaloran;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Kaloran. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Kaloran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Kaloran tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Kecamatan Kaloran;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Kecamatan Kaloran;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Kecamatan Kaloran sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kaloran;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kaloran, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kaloran berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kaloran tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Kaloran. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Kaloran dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Kaloran;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Kaloran;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kaloran;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Kaloran.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kaloran yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Kaloran.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kaloran.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kaloran dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Kaloran;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Kaloran merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Kaloran;

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Kaloran perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Kaloran dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Kaloran dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Kaloran yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan

kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Kaloran untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kaloran.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kaloran selama kurun waktu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Kaloran Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Kecamatan Kaloran Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kaloran Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KALORAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KALORAN****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Kaloran Tahun 2018-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2023 terhadap capaian Renstra Kecamatan Kaloran Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Kaloran sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2024.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Kaloran Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2023 sebagai tahun ke-lima pelaksanaan Renstra Kecamatan Kaloran 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kaloran
s.d Tahun 2023

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)			Target 2023			Realisasi per Triwulan Tahun 2023		Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket.
				K	Rp	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	IV		K	Rp.	K	Rp.	
										K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KECAMATAN ADMINISTRASI															
A	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tersedianya Fasilitas Pendataan Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem	%	0	0	0	100	35.800.000	35.800.000	100	35.300.000	100	35.300.000	100	98,60	
A.1	Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							35.800.000	35.800.000		35.300.000		35.300.000			
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penderita Stunting dan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	Orang/Bulan	3	0	0	3	35.800.000	35.800.000	3	35.300.000	3	35.300.000	100	98,60	
B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Tersedianya administrasi Keuangan Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah (DAU)	%	100	1.840.506.117	1.840.506.117	100	1.840.506.117	1.783.506.830	100	428.372.165	100	1.763.498.548	100	98,88	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.652.963.517	1.652.963.517		1.652.963.517	1.565.823.010		354.301.231		1.550.752.462			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	1.652.963.517	1.652.963.517	12	1.652.963.517	1.565.823.010	3	354.301.231	12	1.550.752.462	100	99,04	
C	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				187.542.600	187.542.600		187.542.600	217.683.820		74.070.934		212.746.086	0,00	97,73	
C.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				48.015.400	48.015.400		48.015.400	52.421.900		14.645.000		52.174.000		99,53	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3.700.000	3.700.000	12	3.700.000	3.697.500	3	-	12	3.695.500	100	99,95	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12.150.000	12.150.000	12	12.150.000	15.101.400	3	4.439.000	12	15.083.500	100	99,88	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	7.165.400	7.165.400	12	7.165.400	6.760.000	3	1.360.000	12	6.759.500	100	99,99	
4	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	15.000.000	15.000.000	12	15.000.000	17.775.000	3	3.884.000	12	17.693.500	100	99,54	

RENJA 2025 | Kecamatan Kaloran

5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	10.000.000	10.000.000	12	10.000.000	9.088.000	3	4.962.000	12	8.942.000	100	98,39
C.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				113.027.200	113.027.200		113.027.200	108.746.720		26.536.234		106.037.386		97,51
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.600.000	2.600.000	12	2.600.000	2.600.000	3	455.000	12	2.575.000	100	99,04
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	20.000.000	20.000.000	12	20.000.000	15.720.000	3	3.679.016	12	14.002.834	100	89,08
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	90.427.200	90.427.200	12	90.427.200	90.426.720	3	22.402.218	12	89.459.552	100	98,93
C.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				26.500.000	26.500.000		26.500.000	56.515.200		32.889.700		54.534.700		96,50
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	19.000.000	19.000.000	10	19.000.000	29.527.000	3	10.253.500	12	27.914.500	100	94,54
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	4.500.000	4.500.000	12	4.500.000	3.984.000	3	0	12	3.984.000	100	100
3	Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	3.000.000	1	3.000.000	23.004.200	1	22.636.200	1	22.636.200	100	98,40
														100	98,06
															SANGAT TINGGI
D	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik							127.640.600	102.100.000		94.800.986		94.800.986		92,85
		Persentase kepemilikan KTP EL di Kecamatan	%				100			100		100		100	
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%				100			100		100		100	
D.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										94.800.986		94.800.986		0
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan				12	127.640.600	102.100.000	0	94.800.986	9	94.800.986	75,00	92,85
														75,00	92,85
															SEDANG
E	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	39.176.800	39.176.800	100	39.176.800	36.904.000	100	4.028.000	100	36.890.000	100	99,96
E.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				39.176.800	39.176.800		39.176.800	36.904.000		4.028.000		36.890.000		

RENJA 2025 | Kecamatan Kaloran

1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga masyarakat	12	39.176.800	39.176.800	12	39.176.800	36.904.000	3	4.028.000	12	36.890.000	100	99,96
														100	99,96
														SANGAT TINGGI	
F	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	13.200.000	13.200.000	100	13.200.000	13.200.000	100	4.400.000	100	13.200.000	100	100
F.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				13.200.000	13.200.000		13.200.000	13.200.000		4.400.000		13.200.000		100
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	13.200.000	13.200.000	12	13.200.000	13.200.000	0	4.400.000	9	13.200.000	75,00	100
														75,00	100
														SEDANG	
G	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik		85			85			100		100		100	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah														
1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen												
														0	
														PREDIKAT SANGAT RENDAH	
H	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa														
		Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa /Kelurahan	%	1			1			0		0		0	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100			100			100		100		100	
H.1	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
1	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen								0			0	0
														0	0

RENJA 2025 | Kecamatan Kaloran

											SANGAT RENDAH					
					2.020.523.517	2.020.523.517		2.056.323.517	1.971.510.830		566.901.151		1.943.689.534			
											87,50	98,59				
											TINGGI					
											85,71					
											TIDAK TERCAPAI					
	: Adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat															
	: Kondisi alam yang tidak bisa diprediksi dan perekonomian masyarakat yang belum stabil pasca pandemi Covid19															
	: Menjaga kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Pelunya menjaga keseimbangan alam.															
	: Meningkatkan dan menjaga kualitas SDM, memahami dan mentaati aturan yang berlaku. Meningkatkan kordinasi dan sinergi dengan instansi terkait lainnya.															

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kaloran
s.d Triwulan I Tahun 2024

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)			Target 2024			Realisasi per Triwulan								Realisasi 2024		Capaian 2024	
				K	Rp	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi Keuangan Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah (DAU)	%		1.652.963.517	1.652.963.517	100	1.834.701.721	2.042.925.583	100	363.742.109		0		0		0	100	363.742.109	100	17,80
A.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.652.963.517	1.652.963.517		1.544.505.121	1.752.728.983		330.410.206		0		0		0		330.410.206		18,85
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	100	1.652.963.517	1.652.963.517	12	1.544.505.121	1.752.728.983	3	330.410.206		0		0		0	3	330.410.206	25,00	18,85
A.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	-		5.792.000	5.792.000		0		0		0		0		0		0
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai dan kelengkapannya	Paket	12	-	-	14	5.792.000	5.792.000	3	0		0		0		0	3	0		0
A.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah				48.015.400	48.015.400		60.959.560	60.959.560		3.087.000		0		0		0		3.087.000		5,06
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3.700.000	3.700.000	12	4.494.000	4.494.000	3	0		0		0		0	3	0	25,00	0
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12.150.000	12.150.000	12	14.000.000	14.000.000	3	460.000		0		0		0	3	460.000	25,00	3,29
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	7.165.400	7.165.400	12	7.000.000	7.000.000	3	1.120.500		0		0		0	3	1.120.500	25,00	16,01
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	15.000.000	15.000.000	12	22.999.560	22.999.560	3	736.500		0		0		0	3	736.500	25,00	3,20
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	10.000.000	10.000.000	12	12.466.000	12.466.000	3	770.000		0		0		0	3	770.000	25,00	6,18
A.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							18.400.000	18.400.000		0		0		0		0		0		0
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	paket				2	18.400.000	18.400.000	3	0		0		0		0	3	0		0
A.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				113.027.200	113.027.200		120.058.240	120.058.240		28.044.903		0		0		0		28.044.903		23,36
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.600.000	2.600.000	12	4.000.000	4.000.000	3	365.000		0		0		0	3	365.000	25,00	9,13

RENJA 2025 | Kecamatan Kaloran

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	20.000.000	20.000.000	12	16.992.000	16.992.000	3	3.798.111	0	0	0	3	3.798.111	25,00	22,35
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		90.427.200	90.427.200	12	99.066.240	99.066.240	3	23.881.792	0	0	0	3	23.881.792	25,00	24,11
A.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10	26.500.000	26.500.000		84.986.800	84.986.800		2.200.000	0	0	0		2.200.000		2,59
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	19.000.000	19.000.000	10	24.507.000	24.507.000	3	1.900.000	0	0	0	3	1.900.000	30,00	7,75
2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	1	4.500.000	4.500.000	10	2.996.000	2.996.000	3	0	0	0	0	3	-	30,00	0
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		3.000.000	3.000.000	12	4.500.000	4.500.000	3	300.000	0	0	0	3	300.000	25,00	6,67
4	Pemeliharaan Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				1	52.983.800	52.983.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	23,85	7,84
																	SANGAT TINGGI	
B	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik				102.100.000	102.100.000		102.100.000	102.100.000		0	0	0	0		0		0
		Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan	%	100			100			100					100			100
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100			100			1,61					1,61			1,61
B.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				102.100.000	102.100.000		102.100.000	102.100.000			0	0	0		0		
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	102.100.000	102.100.000	12	102.100.000	102.100.000	3	0	0	0	0	3	0	25,00	0
																	25,00	0
																	SANGAT TINGGI	
C	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	13.200.000	13.200.000	100	18.192.000	18.192.000	100	2.200.000	0	0	0	100	2.200.000	100	12,09
C.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				13.200.000	13.200.000		18.192.000	18.192.000		2.200.000	0	0	0		2.200.000		12,09

RENJA 2025 | Kecamatan Kaloran

1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	13.200.000	13.200.000	12	18.192.000	18.192.000	3	2.200.000	0	0	0	3	2.200.000	25,00	12,09
																	25,00	12,09
																	SANGAT TINGGI	
D	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa							47.251.000	47.251.000		9.800.000	0	0	0	0,00	9.800.000		20,74
		Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa /Kelurahan	%	100	39.176.800	39.176.800	100			100					100		100	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%		39.176.800	39.176.800	100			100					100		100	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	12	39.176.800	39.176.800	100			100					100		100	
D.1	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							47.251.000	47.251.000		9.800.000	0	0	0		9.800.000		
1	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen				12	4.998.000	4.998.000	3	0				3	0	25,00	0
2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen				12	42.253.000	42.253.000	3	9.800.000				3	9.800.000	25,00	23,19
																	25,00	11,60
																	SANGAT TINGGI	
					2.020.523.517	2.020.523.517		2.002.244.721	2.210.468.583		375.742.109	0	0	0		375.742.109		
																	24,71	17,00
																	SANGAT TINGGI	
																	83,60	
																	TERCAPAI	
: Pelayanan yang baik yang didukung oleh sarpras yang memadai																		
: Persepsi sebagian masyarakat yang menganggap bahwa dokumen kependudukan itu tidak penting																		
: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen.																		
: Untuk tetap direncanakan kegoatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun RENSTRA																		

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2023 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Kaloran Tahun 2018-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Kaloran di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kaloran berupa:

1. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sebagai berikut:
 - a. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.
2. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - c. Penyediaan Bahan logistik Kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - h. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - i. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
 - j. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan prizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - k. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
 - l. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- m. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 - n. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa
 - o. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - p. Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
 - q. fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - r. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
3. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Nihil
 4. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
 - a. Nihil
 5. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Nihil
 6. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan Nihil. *Mereview* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Kaloran. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2023, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Kaloran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja

dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **98,59%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan;
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
2. Persentase realisasi penerimaan PBB;
Capaian Kinerja : 99.30 % kategori Baik
3. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu;
Capaian Kinerja : 100% kategori Baik
4. Persentase penanganan laporan kejadian.
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
5. Persentase tempat ibadah kondisi baik.
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
6. Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan;
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
7. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu.
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan I tahun 2024 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kaloran

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Kaloran dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Kaloran Triwulan I Tahun 2024 (**Laporan IKPD**)
Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw 1 2024	Status Capaian				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan		84	B	B	B	B			B	√				
2	Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan	%	100	100	100	100	100			100	√				
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	95	95	95	1,61			1,69110378					√
4	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam	%	100	100	100	100	100			100	√				
5	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa	%	100	100	100	100	100			100	√				
6	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	%	100	100	100	100	100			100	√				
7	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	%	100	100	100	100	100			100	√				

Satuan Capaian	Range Nilai
ST (Sangat Tinggi)	91% ≤ 100%
T (Tinggi)	76% ≤ 90%
Sedang	66% ≤ 75%
Rendah	51% ≤ 65%
Sangat Rendah	≤ 50%

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 4 terdiri dari:
 - a. Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Standar Pelayanan, Sarpras, SDM yang telah terpenuhi
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Koneksi Jaringan yang sering *Trouble*.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya
 - b. Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Terbentuknya Relawan Grajen Kecamatan Bejen, Koordinasi yang baik antara Muspika, Pemdес dan Relawan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah topologi yang berbukit-bukit membuat sering terjadi tanah longsor dan angin putting beliung.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Meningkatkan koordinasi antara desa, relawan, dan kecamatan
 - c. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kepala desa dan perangkat desa sudah memahami tugas pokok dan fungsinya serta telah memahami aturan tentang disiplin Perangkat Desa sesuai dengan perbup no 40 tahun 2022 tentang disiplin kepala desa dan perangkat desa dan adanya penegakan disiplin kepala desa dan perangkat desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Masih ada sebagian kecil perangkat desa mempunyai mental ingin dilayni bukan sebagai pengayom dan pelayan masyarakat
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Mempertahankan kedisiplinan dan kinerja kepala desa

- dan perangkat desa dengan mensosialisasikan aturan tentang disiplin kepala desa dan perangkat desa.
- d. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kepala desa dan perangkat desa sudah memahami tugas pokok dan fungsinya serta telah memahami aturan tentang disiplin Perangkat Desa sesuai dengan perbup no 40 tahun 2022 tentang disiplin kepala desa dan perangkat desa dan adanya penegakan disiplin kepala desa dan perangkat desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Perangkat desa Kurang memahami juknis dan Juklak dalam penyusunan APBDesa
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Mempertahankan kedisiplinan dan kinerja kepala desa dan perangkat desa dengan mensosialisasikan aturan tentang disiplin kepala desa dan perangkat desa.
 - e. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Peran aktif tim fasilitasi RKP-Desa dalam mendampingi tim penyusun RKP-Desa dan adanya perbup no 69 tahun 2022 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya koordinasi antar Desa membuat beberapa Desa menjadi tertinggal dalam Menyelesaikan RKP-Des.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Memaksimalkan kapasitas SDM dan pelaksanaan kegiatan desa tepat waktu dan melakukan koordinasi awal dengan pemerintah desa untuk perencanaan RKPdes lebih awal.
2. Capaian indikator dengan status upaya keras : Persentase realisasi penerimaan PBB
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tertib administrasi SPPT PBB dan integritas tinggi Petugas PBB di tingkat desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB karena belum

panen dan cenderung membayar diakhir tahun.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan administrasi SPPT PBB sosialisasi terus menerus kepada warga masyarakat.

2.3 Data Pokok

Data Pokok Kecamatan Kaloran digunakan untuk mengelola informasi tentang Kinerja Kecamatan Kaloran yang terdiri dari Indikator Sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan dan 6 (enam) Indikator Kinerja Program yaitu Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan, Persentase realisasi penerimaan PBB, Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam, Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa, Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu, Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku

pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Tabel 2.4
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,59	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,00	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,00 – 3,50	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,50 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017.

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Pelayanan di Kecamatan Kaloran dengan nilai per unsur sebagai berikut:

1. Persyaratan pelayanan
2. Sistem, mekanisme dan Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

Tabel 2.5
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kaloran
Tahun 2020 s.d Tahun 2024 Triwulan I

No.	TAHUN	TARGET	NILAI
1	2020	n.a	82,58
2	2021	83	83
3	2022	83,5	83,5
4	2023	84	84
5	2024	84,5	84,5

Sumber : Kecamatan Kaloran Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kaloran Tahun 2020 baru melaksanakan dengan nilai 82,58, tahun 2021 dengan nilai 83, Tahun 2022 dengan nilai 83,5, tahun 2023 dengan nilai 84 dan tahun 2024 dengan nilai 84,5.

Faktor pendorong indikator adalah kesadaran dan semangat untuk memberikan pelayanan prima agar masyarakat merasa puas.

Rekomendasi tindak lanjut adalah memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada.

2. Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rumus perhitungan Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan adalah Jumlah Pelayanan Masyarakat yang dilayani dibagi Jumlah Permohonan Pelayanan.

Tabel 2.6

Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024

NO	URAIAN	2023	2024
1.	Jumlah Pelayanan Masyarakat yang dilayani	n.a	650
2.	Jumlah Permohonan Pelayanan	n.a	650
3.	Persentase (%)	n.a	100

Sumber : Kecamatan Kaloran 31 Maret 2024

Tahun 2024 adalah tahun pertama penghitungan presentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan. Jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Kaloran adalah sebagai berikut:

No	Jenis Layanan	Produk Layanan	Standar Waktu Layanan	Satuan Waktu Layanan	Biaya Total Layanan
1	Pelayanan Rekomendasi Bantuan	Rekomendasi Camat Proposal	60	Menit	-

No	Jenis Layanan	Produk Layanan	Standar Waktu Layanan	Satuan Waktu Layanan	Biaya Total Layanan
	Keuangan	Bantuan Keuangan			
2	Pelayanan Legalisasi Ahli Waris	Pengesahan Legalisasi Surat	60	Menit	-
3	Pelayanan Pengesahan Surat Pengantar	Pegesahan Surat Keterangan Pengantar	30	Menit	-
4	Pelayanan Rekomendasi Dispensasi Waktu Nikah	Rekomendasi Camat Dispensasi Waktu Nikah	30	Menit	-
5	Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang	Verifikasi dan tanda tangan Formulir	1	Hari	-
6	Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar	Verifikasi dan tanda tangan Formulir	1	Hari	-
7	Pelayanan KK (Kartu Keluarga)	Kartu Keluarga (KK)	2	Hari	-
8	Pelayanan KTP-el	Verifikasi dan tanda tangan formulir	2	Hari	-
9	Pelayanan IKD	Pelayanan Aktivasi IKD	1	Hari	-

3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Definisi PBB adalah perbandingan/rasio jumlah realisasi penerimaan PBB sesuai Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHCP) se-Kecamatan Kaloran.

Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun.

Rumus adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah penerimaan PBB sesuai Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHCP) se Kecamatan Kaloran di kali 100 %

Tabel 2.7

**Persentase realisasi penerimaan PBB
di Kecamatan Kaloran Tahun 2019 s.d Tahun 2024 Triwulan I**

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kaloran	690.992.306	665.978.565	770.308.147	1.287.536.925	1.269.369.732	21.489.113
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Kaloran	690.992.306	665.978.565	796.790.982	1,299,314,412	1.269.369.732	1.337.594.959
3	Persentase (%)	100%	100%	96,68%	99,09%	100%	1,61%

Sumber : Kecamatan Kaloran Tahun 2024

Dari tabel di atas diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kaloran pada Tahun 2024 Triwulan I adalah 1,61% atau sejumlah Rp. 21.489.113,00.

Faktor pendorong adalah tertib administrasi SPPT PBB, integritas petugas PBB di tingkat desa dan fasilitasi pembayaran via online.

Faktor penghambatnya adalah masih adanya sppt yang bermasalah, adanya keterlambatan penyampaian sppt karena wajib pajak berada di luar kota, dan wajib pajak tidak ditemukan.

Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah meningkatkan tertib administrasi pbb dan sosialisasi kepada warga masyarakat.

Tabel 2.8

**Persentase Realisasi Penerimaan PBB
Desa se-Kecamatan Kaloran Tahun 2024 s.d Triwulan I**

No	Desa	Ketetapan	Realisasi	Persentase
1	GANDULAN	72.046.652	263.947	0,37
2	TEGOWANUH	84.156.837	12.488	0,01
3	KEBLUKAN	58.159.074	8.129.244	13,98
4	TEPUSEN	40.819.536	142.549	0,35
5	GEBLOK	113.462.522	40.063	0,04
6	GANDON	86.665.504	35.025	0,04
7	TLETER	86.887.791	0	0,00

No	Desa	Ketetapan	Realisasi	Persentase
8	KUWARAKAN	74.992.137	6.317	0,01
9	GETAS	154.687.726	0	0,00
10	KALIMANGGIS	121.330.568	53.650	0,04
11	TLOGOWUNGU	91.710.810	0	0,00
12	KALORAN	161.632.131	499.661	0,31
13	KEMIRI	94.474.041	12.196.233	12,91
14	TEMPURAN	96.569.630	109.936	0,11
Jumlah Keseluruhan		1.337.594.959	21.489.113	1,61

Sumber: Kecamatan Kaloran Tahun 2024

4. Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan RKPDes Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-Desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir Bulan September.

Pada Tahun 2020 diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan Kegiatan Musrenbang Desa diundur maka RKP-Desa maka RKP-Desa diberikan waktu kelonggaran mundur 1 bulan yaitu Bulan Oktober atas saran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kaloran Tahun 2020 sampai 2024 Triwulan I dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9

Persentase Desa Yang Menyelesaikan Kegiatan RKPDes Tepat Waktu
Kecamatan Kaloran Tahun 2020 s.d Tahun 2024 Triwulan I

No	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah desa yang	14	14	14	14	14

	menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu					
2	Jumlah desa	14	14	14	14	14
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Kaloran Tahun 2024

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 14 desa yang ada di Kecamatan Kaloran dapat menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu.

Faktor pendorong adalah adanya perbup nomor 69 tahun 2022 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa.

Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah melakukan koordinasi awal kepada pemerintah desa dalam rangka penyusunan RKPDes.

Tabel 2.10

Desa Yang Menyelesaikan Kegiatan RKPDes Tepat Waktu
Di Kecamatan Kaloran Tahun 2024

No	Nama Desa	Nomor Rkp-Des	Tgl Penetapan	Keterangan
1	Gandon	4 Tahun 2023	23 September 2023	Tepat Waktu
2	Gandulan	5 Tahun 2023	16 September 2023	Tepat Waktu
3	Geblog	4 Tahun 2023	18 Desember 2023	Tepat Waktu
4	Getas	5 Tahun 2023	12 September 2023	Tepat Waktu
5	Kalimanggis	5 Tahun 2023	27 September 2023	Tepat Waktu
6	Kaloran	4 Tahun 2023	14 September 2023	Tepat Waktu
7	Keblukan	4 Tahun 2023	24 September 2023	Tepat Waktu
8	Kemiri	3 Tahun 2023	27 September 2023	Tepat Waktu
9	Kwarakan	4 Tahun 2023	23 September 2023	Tepat Waktu
10	Tegowanuh	8 Tahun 2023	11 September 2023	Tepat Waktu
11	Tempuran	9 Tahun 2023	5 September 2023	Tepat Waktu
12	Tepusen	10 Tahun 2023	19 September 2023	Tepat Waktu
13	Tleter	6 Tahun 2023	27 September 2023	Tepat Waktu
14	Tlogowungu	4 Tahun 2023	23 September 2023	Tepat Waktu

Sumber: Kecamatan Kaloran Tahun 2024

5. Persentase Penanganan Laporan Kejadian.

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian dibagi jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Kaloran dari tahun 2018 sampai tahun 2024 Triwulan I dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
Persentase Penanganan Laporan Kejadian

di Kecamatan Kaloran Tahun 2020 s.d. 2024 Triwulan I

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	4	1	0	0	1
2	Jumlah laporan kejadian	4	1	0	0	1
	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Kaloran Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian adalah 100 %, artinya semua laporan kejadian ditindaklanjuti.

Pada Tahun 2024 Triwulan I di Kecamatan Kaloran tidak ada laporan kejadian, sebagaimana tabel di bawah ini.

Faktor pendorong adalah telah terbentuknya desa tangguh bencana dan masyarakat memiliki kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana.

Faktor penghambatnya adalah faktor alam yang tidak bisa diprediksi.

Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah meningkatkan sosialisasi kepada warga masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian dan menjaga keseimbangan alam.

Tabel 2.12
Data laporan Kejadian
Sampai Tahun 2024 Triwulan I

No	Nama Desa	Jumlah Laporan Kejadian	Keterangan
1	Kaloran	0	-
2	Tlogowungu	0	-
3	Gandon	0	-
4	Tleter	0	-
5	Getas	1	-
6	Kalimanggis	0	-
7	Tempuran	0	-
8	Kemiri	0	-
9	Geblog	0	-
10	Tegowanuh	0	-
11	Keblukan	0	-
12	Tepusen	0	-
13	Gandulan	0	-
14	Kwarakan	0	-

Sumber Kecamatan Kaloran 2024

6. Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- Tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- Tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- Melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumusnya adalah jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Kaloran dari tahun 2020 sampai tahun 2024 Triwulan I dapat dilihat pada

tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa
di Kecamatan Kaloran Tahun 2020 s.d 2024 Triwulan I

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Kaloran (jiwa)	0	0	0	0	0
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Kaloran (jiwa)	224	214	214	214	214
3	Persentase (%)	0	0	0	0	0

Sumber :Kecamatan Kaloran Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak ada pelanggaran disiplin yang dilakukan perangkat desa sehingga persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Kaloran selalu 0%.

Faktor pendorongnya adalah meningkatnya kesadaran warga akan pentingnya kedisiplinan.

Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kedisiplinan.

Tabel 2.14
Jumlah Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa
di Kecamatan Kaloran Tahun 2024 s.d Triwulan I

No	Nama Desa	Jumlah Perangkat	Jumlah Pelanggaran
1	Kaloran	23	0
2	Tlogowungu	17	0
3	Gandon	15	0
4	Tleter	16	0
5	Getas	17	0
6	Kalimanggis	15	0
7	Tempuran	14	0
8	Kemiri	15	0

9	Geblog	12	0
10	Tegowanuh	15	0
11	Keblukan	13	0
12	Tepusen	15	0
13	Gandulan	13	0
14	Kwarakan	14	0
	TOTAL	214	0

Sumber Kecamatan Kaloran 2024

7. Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB-Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kaloran dari tahun 2020 hingga 2024 Triwulan I, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15

Persentase Desa Yang Menyelesaikan Kegiatan APBDes Tepat Waktu
Di Kecamatan Kaloran 2020 s.d 2024 Triwulan I

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	14	14	14	14	14
2	jumlah desa	14	14	14	14	14
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Kaloran Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kaloran sejak tahun 2020–2024 Triwulan I mencapai 100%.

Faktor pendorong adalah adanya Perbup nomor 50 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup nomor 53 tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa di desa.

Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah monitoring evaluasi secara intensif ke pemerintah desa.

Tabel 2.16

Persentase Desa Yang Menyelesaikan Kegiatan APBDes Tepat Waktu
Di Kecamatan Kaloran Tahun 2024 s.d Triwulan I

No	Nama Desa	Nomor	Tanggal Penetapan	Keterangan
1	Kaloran	6 Tahun 2023	31 Desember 2023	Tepat Waktu
2	Getas	9 Tahun 2023	31 Desember 2023	Tepat Waktu
3	Kwarakan	8 Tahun 2023	31 Desember 2023	Tepat Waktu
4	Gandulan	7 Tahun 2023	31 Desember 2023	Tepat Waktu
5	Tempuran	4 Tahun 2023	31 Desember 2023	Tepat Waktu
6	Tleter	9 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
7	Tlogowungu	6 Tahun 2023	31 Desember 2023	Tepat Waktu
8	Kemiri	7 Tahun 2023	31 Desember 2023	Tepat Waktu
9	Tepusen	6 Tahun 2023	31 Desember 2023	Tepat Waktu
10	Kalimanggis	11 Tahun 2023	31 Desember 2023	Tepat Waktu
11	Gandon	4 Tahun 2023	31 Desember 2023	Tepat Waktu
12	Geblog	12 Tahun 2023	31 Desember 2023	Tepat Waktu
13	Tegowanuh	6 Tahun 2023	31 Desember 2023	Tepat Waktu
14	Keblukan	6 Tahun 2023	31 Desember 2023	Tepat Waktu

Sumber: Kecamatan Kaloran Tahun 2024

2.4 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kaloran

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kaloran dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan

dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kaloran sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Kaloran dari 10 indikator terdapat 1 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator persentase Realisasi penerimaan PBB

Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB karena belum panen dan cenderung membayar diakhir tahun.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kaloran, antara lain :

- Masih adanya Sumber Daya Manusia bagi aparat ditingkat desa dan kecamatan yang belum memadai utamanya dibidang informasi teknologi (IT)
- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar perlu ditingkatkan adanya sosialisasi/ bimbingan teknis dibidang informasi teknologi (IT)

2.5 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.17 berikut:

Tabel 2.17
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL PENETAPAN						
	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana
	UNSUR KEWILAYAHAN							UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN							KECAMATAN					
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.752.728.983		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.752.728.983
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kaloran	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15	Orang	1.752.728.983	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kaloran	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15	Orang	1.752.728.983
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					77.653.560		Administrasi Umum Perangkat Daerah					77.653.560
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kaloran	Tersedianya komponen instalasi listrik	4	Paket	3.000.000	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kaloran	Tersedianya komponen instalasi listrik	4	Paket	3.000.000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kaloran	Tersedianya Paket Bahan Logistik kantor	12	Paket	14.000.000	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kaloran	Tersedianya Paket Bahan Logistik kantor	12	Paket	14.000.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kaloran	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	13	Paket	7.000.000	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kaloran	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	13	Paket	7.000.000
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kaloran	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	6	Laporan	22.999.560	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kaloran	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	6	Laporan	22.999.560
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kaloran	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6	Laporan	30.654.000	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kaloran	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6	Laporan	30.654.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah					24.500.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah					24.500.000

RENJA 2025 | Kecamatan Kaloran

7	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Kec. Kaloran	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3	Peralatan	24.500.000	7	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Kec. Kaloran	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3	Peralatan	24.500.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					125.034.040		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					125.034.040
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kaloran	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	12	Laporan	8.970.000	8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kaloran	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	12	Laporan	8.970.000
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kaloran	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	Laporan	16.997.800	9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kaloran	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	Laporan	16.997.800
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kaloran	Tersedianya honorarium/upahi, penjaga malam, tenaga kebersihan, luran jaminan kesehatan	12	Laporan	99.066.240	10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kaloran	Tersedianya honorarium/upahi, penjaga malam, tenaga kebersihan, luran jaminan kesehatan	12	Laporan	99.066.240
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					72.001.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					72.001.000
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kaloran	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan terpenuhinya pembayaran Perpanjangan STNK kendaraan dinas	11	Kendaraan	24.507.000	11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kaloran	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan terpenuhinya pembayaran Perpanjangan STNK kendaraan dinas	11	Kendaraan	24.507.000
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kaloran		3	peralatan	4.494.000	12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kaloran		3	peralatan	4.494.000
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kaloran	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	Gedung	43.000.000	13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kaloran	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	Gedung	43.000.000
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100%		102.100.000	B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100%		102.100.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			95%				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			95%		

RENJA 2025 | Kecamatan Kaloran

1 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kaloran	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	4	Laporan	102.100.000	14	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kaloran	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	4	Laporan	102.100.000
C	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						C	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					18.200.000		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					18.200.000
1 5	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kaloran	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	4	Laporan	18.200.000	15	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kaloran	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	4	Laporan	18.200.000
D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					38.251.000	D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					38.251.000
1 6	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Kaloran	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4	Laporan	38.251.000	16	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Kaloran	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4	Laporan	38.251.000
JUMLAH DAU						2.210.468.583	JUMLAH DAU						2.210.468.583
JUMLAH TOTAL						2.210.468.583	JUMLAH TOTAL						2.210.468.583

Sumber : Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.6 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Kaloran. Namun dalam proses ini Kecamatan Kaloran mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kaloran terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.18

Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	NIHIL				

2.7 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Kaloran ada 0 inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.19

Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2021-2023

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	NIHILS						
2							

2.8 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Kaloran ada 0 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.20

Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	NIHIL			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Kaloran lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kaloran

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2025, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani; dan
2. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kaloran dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Kaloran.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2025 ini adalah dalam rangka:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Kaloran Kab. Temanggung pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2025
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan		B	B
	Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan Desa	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan	%	100	100
			Persentase realisasi penerimaan PBB	%	95	95
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa	%	100	100

			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	%	100	100
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	%	100	100
	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam	%	100	100

Sumber : Renstra Kecamatan Kaloran Kab. Temanggung Tahun 2024-2026

Kebijakan dan strategi Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Kaloran Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Kecamatan Kaloran Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Kecamatan Kaloran Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2025.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2025 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Kaloran Kab. Temanggung Tahun 2025

RANCANGAN RENJA KECAMATAN KALORAN TAHUN 2025			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025				(+ / -)
NO	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif		NO	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.752.728.983			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.752.728.983	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.752.728.983		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.752.728.983	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.653.560			Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.653.560	
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000		2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.000.000		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	22.999.560		5	Fasilitas Kunjungan Tamu	22.999.560	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.654.000		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.654.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	24.500.000			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	24.500.000	
7	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	24.500.000		7	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	24.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.034.040			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.034.040	
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.970.000		8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.970.000	
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.997.800		9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.997.800	
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.066.240		10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.066.240	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.001.000			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.001.000	
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.507.000		11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.507.000	
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.494.000		12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.494.000	

RENJA 2025 | Kecamatan Kaloran

13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.000.000		13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.000.000	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	102.100.000		B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	102.100.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
14	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	102.100.000		14	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	102.100.000	
C	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			C	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.200.000			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.200.000	
15	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18.200.000		15	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18.200.000	
D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	38.251.000		D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	38.251.000	
16	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	38.251.000		16	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	38.251.000	
JUMLAH		2.210.468.583		JUMLAH		2.210.468.583	

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2024

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kaloran Kab. Temanggung
Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.210.468.583					2.255.063.023
7 01	KECAMATAN					2.210.468.583					2.255.063.023
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tersedianya administrasi Keuangan Umum dan Jasa Penunjang Perangkat daerah (DAU)		100%						
7 01 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.752.728.983					1.752.728.983
7 01 01 202 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kaloran		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	1.752.728.983	DAU		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	1.752.728.983
7 01 01 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah					77.653.560					99.000.000
7 01 01 206 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kaloran		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.000.000	DAU		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
7 01 01 206 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kaloran		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.000.000	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	18.000.000

RENJA 2025 | Kecamatan Kaloran

7	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kaloran		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	7.000.000	DAU	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	10.000.000
7	01	01	206	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Kaloran		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Laporan	22.999.560	DAU	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Laporan	27.000.000
7	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kaloran		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	30.654.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	40.000.000
7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah					24.500.000				27.000.000
7	01	01	207	006	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Kec. Kaloran		Jumlah Peralatan Dan Mesin Yang Disediakan	3 Peralatan	24.500.000	DAU	Jumlah Peralatan Dan Mesin Yang Disediakan	3 Peralatan	27.000.000
7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					125.034.040				128.034.040
7	01	01	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kaloran		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.970.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.975.800
7	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kaloran		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.997.800	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.992.000
7	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kaloran		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	99.066.240	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	99.066.240
7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					72.001.000				88.000.000

RENJA 2025 | Kecamatan Kaloran

7	01	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kaloran		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Kendaraan	24.507.000	DAU		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Kendaraan	28.000.000
7	01	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kaloran		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	3 peralatan	4.494.000	DAU		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	3 peralatan	5.000.000
7	01	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kaloran		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	43.000.000	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	55.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase Jumlah Pelayanan Masyarakat di Kecamatan	100%	102.100.000					102.100.000
7	01	02	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Persentase Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan	95%						
7	01	02	204	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kaloran		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	102.100.000	DAU		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	102.100.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase Penyelesaian Penanganan Laporan Kejadian, Gangguan Kamtibmas dan Bencana Alam di Kecamatan							
7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					18.200.000					18.200.000

RENJA 2025 | Kecamatan Kaloran

7 01 04 201 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kaloran		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	18.200.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	18.200.000
7 01 06 201	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase Penyelesaian Pelanggaran disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan	100%	38.251.000					40.000.000
				Persentase Jumlah Desa di Kecamatan Yang menyelesaikan RKP-Des Tepat Waktu	100%						
				Persentase Jumlah Desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des Tepat Waktu	100%						
7 01 06 201 0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Kaloran		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Laporan	38.251.000	DAU		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Laporan	40.000.000
TOTAL						2.210.468.583					2.255.063.023

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Kaloran untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Kaloran itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Kaloran dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2025 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 1.943.690.434,- atau 98,96 %, realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.550.753.362,- atau 99,04%, Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 380.439.072,- atau 98,72 dan Belanja Modal sebesar 96,15 % atau 12.500.000,- sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. Rp. 960.194.372,- atau 43,44%, realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 883.888.427,- atau 49,57%, Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 76.305.945,- atau 22,76 % dan Belanja Modal sebesar 0 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Kaloran mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 2.210.468.583,-

yang terdiri dari 4 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Kecamatan Kaloran dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung,

2024



JULI RIASTIANA T, S.Sos, MM
Pembina Tk. I

NIP. 19680716 198803 2 002